



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIANA PURWITASARI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO DAN INFORMATIKA
CERDAS
3. NHK : 869059

II. DATA HARTA

| A. TANAH DAN BANGUNAN | Rp. | 1.500.000.000 |
|--|------------|----------------------|
| 1. Tanah Seluas 135 m ² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000 | | |
| B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN | Rp. | 455.000.000 |
| 1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000 | | |
| 2. MOBIL, HYUNDAI Creta Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000 | | |
| 3. MOBIL, KIA SONNET Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000 | | |
| C. HARTA BERGERAK LAINNYA | Rp. | 20.000.000 |
| D. SURAT BERHARGA | Rp. | --- |
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 620.000.000 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | --- |
| Sub Total | Rp. | 2.595.000.000 |
| III. HUTANG | Rp. | 37.000.000 |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 2.558.000.000 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.